

- POLITICAL PARTIES  
- COALITION GOVERNMENTS

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

13

**KOALISI PARTAI POLITIK  
(STUDI TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PERUBAHAN KOALISI PARTAI POLITIK DARI  
PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID KE MEGAWATI  
SOEKARNOPUTRI)**

KK

FIS P 23 /02

Sub  
le

**SKRIPSI**



**Disusun oleh :**



**SUBHAN  
079615033**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
SEMESTER GENAP 2002**

**KOALISI PARTAI POLITIK  
(STUDI TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PERUBAHAN KOALISI PARTAI POLITIK DARI  
PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID KE MEGAWATI  
SOEKARNOPUTRI)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Salah Satu  
Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik**



**Diusun oleh :**

**SUBHAN  
079615033**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
SEMESTER GENAP 2002**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setuju untuk diujikan  
Surabaya, 12 Juni 2002

Dosen Pembimbing



Drs Wisnu Pramutanto Msi  
NIP.131 453 124



**HALAMAN PENGESAHAN**

**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Panitia  
Penguji pada tanggal 24 Juni 2002**

**Panitia penguji terdiri dari :**

**Ketua,**



**(Drs. Kris Nugroho, MA)**  
**NIP. 131 801 643**

**Anggota,**

Handwritten signature of Wisnu Pramutanto in black ink.

**(Drs. Wisnu Pramutanto, Msi)**  
**NIP. 131 453 124**

**Anggota,**

Handwritten signature of Priyatmoko in black ink.

**(Drs. Priyatmoko, MA)**  
**NIP. 130 937 952**

## ABSTRAKSI

Fokus akhir dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan perubahan koalisi partai politik dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan koalisi partai politik, berimplikasi pada terjadinya pergeseran kepemimpinan nasional dari Presiden Abdurrahman Wahid ke Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Terselenggaranya Pemilu multi partai tahun 1999, secara minimal telah menempatkan Indonesia pada jalur demokratisasi yang benar dalam pergulatan masa transisi menuju sistem politik yang demokratis.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif, bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi dokumenter. Semua ini dibingkai dalam kerangka pemikiran yang menekankan pada teori demokrasi, partai politik dan elite politik

Realitas yang terjadi di dalam Pemilu 1999, yang merupakan titik awal bangsa Indonesia untuk memasuki masa transisi menuju demokrasi ternyata tidak menghasilkan partai politik yang dapat memenangkan pemilu secara mayoritas sederhana apalagi mayoritas mutlak (*absolute majority*) dalam pengumpulan suara. Sebagai indikator adalah PDI-P yang hanya mampu mendapatkan 30 persen suara. Semua ini memberikan peluang bagi partai politik untuk melakukan koalisi. Proses terpilihnya Abdurrahman Wahid menjadi Presiden, tentu tidak bisa dilepaskan dari terbentuknya koalisi beberapa partai politik (PPP, PKB, PAN, PBB, PK dan Golkar). Sedangkan faktor yang mendorong terjadinya koalisi yang mendukung Abdurrahman Wahid adalah ketakutan dari kelompok-kelompok Islam yang termanifestasikan pada elite-elite partai politik Islam ataupun yang berbasis massa Islam, jika Megawati yang terkenal nasionalis terpilih untuk menjadi Presiden dalam Sidang Umum MPR 1999. Melihat pada kenyataan rendahnya perolehan suara partai-partai politik Islam serta semakin mengerasnya persaingan antara Habibie sebagai calon dari Partai Golkar dengan Megawati sebagai calon dari PDI P, membuat beberapa partai politik yang tergabung dalam Poros Tengah mencoba untuk memberikan alternatif lainnya yaitu dengan mencalonkan Gus Dur sebagai Presiden.

Sebagai presiden yang terpilih melalui dukungan koalisi antara beberapa partai politik, Gus Dur adalah harapan, namun semua itu kemudian menghilang sebagai buah implikasi dari kinerja pemerintahan yang kacau, bongkar pasang kabinet, ucapan kontroversial sampai perjalanan keluar negeri yang dilakukan presiden dengan memakan banyak waktu. Gus Dur lupa bahwasannya dukungan yang diberikan elite-elite partai politik jika tidak dikelola dengan manajemen yang baik, dapat berakibat pada retaknya koalisi yang berarti memperbesar konflik politik. Implikasi dari semua itu adalah pada lemahnya *governability* yang kemudian memunculkan ketidakpuasan politik dari kekuatan-kekuatan politik ataupun elite-elite politik untuk kemudian mencabut dukungan yang pernah diberikan.

Abdurrahman Wahid kemudian dijatuhkan melalui mekanisme memorandum pertama, kedua sampai diselenggarakannya Sidang Istimewa 2001, membuktikan betapa telah terjadi perubahan koalisi diantara partai politik yang termanifestasikan dalam fraksi-fraksi yang ada di DPR/MPR. Semua ini memperlihatkan bahwa realitas politik di Indonesia menunjukkan peran signifikan partai politik dalam proses dan konstelasi politik maupun perubahan-perubahan kekuasaan yang terjadi di era transisi Indonesia.

**Kata Kunci : Partai Politik, Koalisi, Elite Politik.**